

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDAPATAN dan PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR :
TANGGAL :

**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD)
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KOTA MAGELANG TAHUN 2014**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang Tahun 2011 – 2015. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang juga sebagai bahan untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2014.

Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang tahun 2014 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD, Program dan Kegiatan yang ada di Renja SKPD harus tercantum dalam Renstra SKPD yang selanjutnya menjadi dasar/pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang Tahun 2014.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Kasubag/Kasie pada Sekretariat, Bidang Pendapatan Asli Daerah, Bidang Perimbangan lain-lain Pendapatan dan Pembiayaan, Bidang Anggaran, Bidang Pembelian dan Bidang Akuntansi agar diprioritaskan mendapatkan anggaran pada tahun 2014.

Kemudian usulan kegiatan tersebut dibawa/dibahas dalam rapat struktural Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang dirangkum menjadi Rancangan Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Daerah Kota Magelang dan disepakati dan diolah serta diajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Magelang untuk pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran Kota Magelang. Hasil pembahasan dan kesepakatan dengan Tim Anggaran tersebut untuk selanjutnya menjadi Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan mempunyai Rencana Kerja Tahunan (Renja SKPD) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Resntra) SKPD. Untuk itu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) jangka waktu 5 tahun Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program, sedangkan Renstra dijabarkan lebih lanjut kedalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang.

Sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang Tahun 2012, disebutkan pada Bab. I Pendahuluan bahwa RKPD Kota Magelang tahun 2014 ini merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2011 – 2015, perencanaan pada tahun 2013 untuk dilaksanakan di tahun 2014.

Adapun Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang tahun 2011-2015 yaitu "TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL, DAN TRANSPARAN", sedangkan makna Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang tersebut adalah:

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang Anggaran, pendapatan, perimbangan dan pembiayaan, pembelanjaan, akuntansi, dituntut adanya profesionalisme didalam perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Profesional mengandung arti penguasaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan seluk beluk bidang tugas profesinya (dalam hal ini bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan).

Sedangkan perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan dimaksudkan sebagai suatu proses aktivitas kerja di bidang keuangan yang dimulai dari perencanaan, penggalan, pendataan, pengkoordinasian, penetapan, pemungutan, pembelanjaan, dan akuntansi ,pembantuan, penyuluhan, pembinaan, pengawasan, pencatatan, evaluasi dan pelaporan, agar pengelolaan keuangan dapat tertib,transparan, dan dapat dipertanggung-jawabkan sehingga terwujud aparatur yang bersih dan terselenggaranya pemerintahan yang dipercaya. Dengan demikian akan terwujud adanya pemerintahan yang baik (Good Governance) dan

sekaligus pemerintah yang bersih (Clean Government). Dengan demikian DPPKD dituntut untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Visi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang dan guna mewujudkan Visi tersebut diatas telah disusun tiga Misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan aparatur Pengelola Keuangan daerah yang profesional, akuntabel dan transparan
- b. Mengembangkan sistem dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah
- c. Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja SKPD Tahun 2014 diantaranya adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2014;
 13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang;
 14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja;
 16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Magelang Tahun 2005 – 2025;
 18. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2010 – 2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang Tahun 2014 adalah sebagai pedoman dan arah di dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2014 bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang.

Adapun tujuan dibuatnya Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah :

1. Sebagai pengendali kegiatan di DPPKD agar terarah dan sesuai dengan Visi, Misi, Strategi, Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan;

2. Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan;
3. Terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arah yang terpadu dengan strategi yang tepat dan terukur;
4. Sebagai pedoman penyusunan kegiatan di DPPKD
5. Sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja kegiatan di DPPKD Kota Magelang.

Dengan demikian dokumen Renja DPPKD Tahun 2014 sebagai pedoman dan arah didalam menyusun anggaran DPPKD dan sebagai dasar penentuan KUA dan PPAS, RKA tahun 2014 oleh Kepala DPPKD Kota Magelang.

1.4. Sistematika Renja SKPD

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang Tahun 2013 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memuat Pengertian Renja SKPD, Visi dan Misi SKPD sesuai Renstra SKPD, serta proses penyusunan Renja SKPD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan dari disusunnya Renja SKPD.

1.4. Sistematika Renja SKPD

Mengemukakan sistematika Renja SKPD terkait dengan pengaturan serta penjelasan ringkas isi dari setiap BAB.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2011 DAN CAPAIAN RENSTRA

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2011 dan Capaian Renstra SKPD.

Mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2011, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/kegiatan Renstra SKPD.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD-DPPKD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

Hasil Kajian tersebut dirangkum kedalam tabel Rekapitulasi hasil evaluasi Pelaksanaan Program dan kegiatan Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun lalu dan Realisasi Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang.

2.3. isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD DPPKD

Berisikan Sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan mulai dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta sinkronisasi

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Memuat tujuan dan sasaran Renja untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat Program dan kegiatan Tahun 2014 sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran tersebut.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2012

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Rencana Kerja (Renja) suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Renstra SKPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri dapat dijelaskan sebagai keluaran/ hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu suatu kebijakan/ program/ kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Renja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2012, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program/kegiatan Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, adapun tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra SKPD dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel II.1

**REKAPITULASI HASIL EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2012
dan REALISASI RENSTRA DPPKD KOTA MAGELANG**

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2011	Target dan realisasi Program dan kegiatan tahun 2012			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2013)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2013		
					Target Renja SKPD Th. 2012	Realisasi Renja SKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja SKPD Th. 2013	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	20		URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH DAN PERSANDIAN	Rasio Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh SKPD							
1	20	17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tingkat Capaian Kinerja Pemerintah Kota	Tercapainya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel						
1	20	17	001	1 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Sebagai pedoman bagi Pengelola Keuangan	85 buku	100 buku	100%	100 buku	300 buku	352,94%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2011	Target dan realisasi Program dan kegiatan tahun 2012			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2013)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2013	
					Target Renja SKPD Th. 2012	Realisasi Renja SKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja SKPD Th. 2013	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1 20 17 005	2 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	Tercapainya target PAD	2 perda	2 perda	0 perda	0 perda	0%	0 perda	2 perda	100,00%
1 20 17 006	3 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Penetapan Perda tentang APBD TA 2012	350 buku	244 buku	350 buku	350 buku	100%	350 buku	944 buku	269,71%
1 20 17 007	4 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Penetapan Perwal tentang Penjabaran APBD TA 2012	275 buku	169 buku	275 buku	275 buku	100%	275 buku	719 buku	261,45%
1 20 17 008	5 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Penetapan Perda tentang Perubahan APBD TA 2011	350 buku	320 buku	350 buku	350 buku	100%	350 buku	1.020 buku	291,43%
1 20 17 009	6 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	Penetapan Perwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	275 buku	210 buku	275 buku	275 buku	100%	275 buku	760 buku	276,36%
1 20 17 010	7 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersedianya buku laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	465 buku	468 buku	468 buku	468 buku	100%	468 buku	1.404 buku	301,94%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2011	Target dan realisasi Program dan kegiatan tahun 2012			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2013)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2013	
					Target Renja SKPD Th. 2012	Realisasi Renja SKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja SKPD Th. 2013	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1 20 17 011	8 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Tersedianya buku Raperwal dan Perwal	120 buku	120 buku	120 buku	120 buku	100%	120 buku	360 buku	300,00%
1 20 17 019	9 Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Tercapainya target PAD	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	25 laporan	49 laporan	408,33%
1 20 17 020	10 Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Nota kesepakatan KUA	150 buku	150 buku	150 buku	150 buku	100%	150 buku	450 buku	300,00%
1 20 17 021	11 Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Nota kesepakatan PPAS	150 buku	160 buku	150 buku	150 buku	100%	150 buku	460 buku	306,67%
1 20 17 022	12 Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	Nota kesepakatan perubahan KUA	150 buku	160 buku	150 buku	150 buku	100%	150 buku	460 buku	306,67%
1 20 17 023	13 Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Nota kesepakatan perubahan PPAS	150 buku	160 buku	150 buku	150 buku	100%	200 buku	510 buku	340,00%
1 20 17 024	14 Penelitian DPA SKPD	DPA SKPD sesuai dengan Perda dan	48 SKPD	48 SKPD	48 SKPD	48 SKPD	100%	48 SKPD	144 SKPD	300,00%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2011	Target dan realisasi Program dan kegiatan tahun 2012			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2013)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2013				
					Target Renja SKPD Th. 2012	Realisasi Renja SKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja SKPD Th. 2013	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)			
		Perwal APBD											
1	20	17	025	15 Pengesahan DPA SKPD	Dokumen pengesahan DPA SKPD	48 SKPD	0 -	0 -	0 -	0%	0 -	0 -	0,00%
1	20	17	027	16 Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	Tertib administrasi	88 bendel	88 bendel	88 bendel	88 bendel	100%	88 bendel	264 bendel	300,00%
1	20	17	028	17 Pengujian SPM langsung dan penerbitan SP2D SKPD	SP2D SKPD sebagai alat pencairan dana	1.750 SP2D	1.750 SP2D	1.600 SP2D	1.669 SP2D	104%	1.800 SP2D	5.219 SP2D	298,23%
1	20	17	029	18 Penerbitan SP2D belanja beban sementara (UP, GU, TU) dan belanja LS (BT)	SP2D sebagai bukti penerimaan bendahara	- -	0 -	-	0 -	0%	0 -	0 -	0,00%
1	20	17	030	19 Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek	Sebagai pengendali dalam Pelaksanaan pengeluaran belanja	48 SKPD	48 SKPD	3.000 SKPD	3.351 SKPD	112%	46 SKPD	3.445 SKPD	7177,08%
1	20	17	031	20 Penatausahaan administrasi belanja tidak langsung dan belanja langsung	Sebagai dasar penerbitan SPD	- -	0 -	0 -	0 -	0%	0 -	0 -	0,00%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2011	Target dan realisasi Program dan kegiatan tahun 2012			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2013)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2013	
					Target Renja SKPD Th. 2012	Realisasi Renja SKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja SKPD Th. 2013	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1 20 17 032	21 Pengesahan dan penerbitan SPD	Sebagai dasar penerbitan SPD	100 SPD	100 SPD	100 SPD	96 SPD	96%	98 SPD	294 SPD	294,00%
1 20 17 038	22 Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	Tersedianya buku laporan keuangan	696 buku	696 buku	696 buku	696 buku	100%	612 buku	2.004 buku	287,93%
1 20 17 045	23 Meneliti dan asistensi laporan keuangan SKPD	Tersedianya bahan laporan keuangan daerah	552 laporan	552 laporan	552 laporan	552 laporan	100%	552 laporan	1.656 laporan	300,00%
1 20 17 046	24 Pengendalian dan penerbitan SPM	Tersedianya SPM sebagai bukti akurat untuk penerbitan SP2D	1.500 SPM	2.874 SPM	1.500 SPM	1.581 SPM	105%	1.500 SPM	5.955 SPM	397,00%
1 20 17 048	25 Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak	Penerimaan PAD meningkat	12 bendel	12 bendel	12 bendel	12 bendel	100%	10 bendel	34 bendel	283,33%
1 20 17 055	26 Penyusunan dokumen perjanjian reklame dan penempatan	Terpenuhinya target PAD dari Pajak Reklame	12 bendel	12 bendel	12 bendel	12 bendel	100%	0 bendel	24 bendel	200,00%
1 20 17 057	27 Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB	Penerimaan PAD meningkat	510 exemplar	510 exemplar	510 exemplar	510 exemplar	100%	510 exemplar	1.530 exemplar	300,00%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2011	Target dan realisasi Program dan kegiatan tahun 2012			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2013)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2013	
					Target Renja SKPD Th. 2012	Realisasi Renja SKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja SKPD Th. 2013	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1 20 17 061	28 Penyusunan anggaran kas	Sebagai rencana penarikan dana setiap triwulan	75 buku	75 buku	75 buku	75 buku	100%	75 buku	225 buku	300,00%
1 20 17 063	29 Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)	DPPA SKPD sesuai dengan Perda dan Perwal tentang Perubahan APBD	48 SKPD	48 SKPD	48 SKPD	48 SKPD	100%	48 SKPD	144 SKPD	300,00%
1 20 17 064	30 Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)	Dokumen pengesahan DPPA SKPD	- -	0 -	0 -	0 -	0%	0 -	0 -	0,00%
1 20 17 065	31 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (lanjutan)	Penetapan Perda lanjutan	- -	0 -	110 -	110 -	100%	0 -	110 -	0,00%
1 20 17 066	32 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (lanjutan)	Penetapan Perwal dan Raperwal Penjabaran APBD TA 2010 lanjutan	- -	0 -	110 -	110 -	100%	0 -	110 -	0,00%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2011	Target dan realisasi Program dan kegiatan tahun 2012			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2013)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2013	
					Target Renja SKPD Th. 2012	Realisasi Renja SKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja SKPD Th. 2013	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1 20 17 067	33 Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan	Tertib administrasi pencairan dan penyerapan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan	16 laporan	16 laporan	16 laporan	16 laporan	100%	16 laporan	48 laporan	300,00%
1 20 17 068	34 Penatausahaan Administrasi BelanjaBantuan Keuangan dan Tak Terduga	Dokumen sesuai dengan ketentuan	3.000 buah	2.666 buah	3.000 buah	1.317 buah	44%	3.000 buah	6.983 buah	232,77%
1 20 17 071	35 Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Laporan bulanan dan surat menyurat	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	36 laporan	300,00%
1 20 17 072	36 Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah	Tersedianya laporan pendapatan	12 laporan	12 laporan	60 laporan	60 laporan	100%	60 laporan	132 laporan	1100,00%
1 20 17 076	37 Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak	Tercapainya target PAD	500 WP	500 WP	9 bendel	9 bendel	100%	9 bendel	518 bendel	103,60%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2011	Target dan realisasi Program dan kegiatan tahun 2012			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2013)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2013				
					Target Renja SKPD Th. 2012	Realisasi Renja SKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja SKPD Th. 2013	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)			
	daerah												
1	20	17	082	38 Pengkajian Permohonan Bantuan Sosial	Sebagai Sebagai dasar penerbitan SP2D Bantuan	0 -	1.515 SP2D	0 SP2D	0 SP2D	0%	0 SP2D	1.515 SP2D	-
1	20	17	084	39 Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya pemahaman pengelolaan keuangan daerah	0 -	120 orang	120 orang	120 orang	100%	120 orang	360 orang	-
1	20	17	085	40 Intensifikasi pemungutan PBB	Tercapainya target PBB	33.000 WP	33.000 WP	33.000 WP	34.801 WP	105%	35.000 WP	102.801 WP	311,52%
1	20	17	086	41 Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB	Penerimaan PBB meningkat	240 laporan	240 laporan	240 laporan	240 laporan	100%	240 laporan	720 laporan	300,00%
1	20	17	087	42 Pengelolaan Pengarsipan dokumen pencairan dana	Tertatanya dokumen pencairan dana	750 dokumen	640 dokumen	750 dokumen	675 dokumen	90%	500 dokumen	1.815 dokumen	242,00%
1	20	17	088	43 Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Perda tentang Pajak	Tercapainya target PAD	0 -	7 buah	7 buah	7 buah	100%	0 buah	14 buah	-

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2011	Target dan realisasi Program dan kegiatan tahun 2012			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2013)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2013		
					Target Renja SKPD Th. 2012	Realisasi Renja SKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja SKPD Th. 2013	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)	
	Daerah										
1	20	17	089	44 Penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah	Tercapainya target PAD	12 bendel	12 bendel	100%	12 bendel	36 bendel	300,00%
1	20	17	093	45 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	tersedianya buku prognosis realisasi APBD	88 buku	0 -	100%	88 buku	176 buku	200,00%
1	20	17	096	46 BinteK Pengelolaan PBB	Tersedianya SDM siap pakai	0 -	0 -	100%	0 orang	50 orang	-
1	20	17	097	47 Pengelolaan data dan Informasi PBB	Jumlah WP-PBB terlayani	33.000 wp	0 -	102%	35.000 WP	69.801 WP	211,52%
1	20	17	098	48 Penyusunan Perda Pengelolaan PBB	Pedoma pelaksanaan PBB P-2	0 -	0 -	100%	0 set	1 set	-
1	20	17	100	49 Persiapan Peralihan PBB	Peningkatan PAD'	0 0,00	0 -	100%	0 %	100 %	-
									0	-	
1	20	20		Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan	Hasil opini BPK untuk Laporan Keuangan						

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2011	Target dan realisasi Program dan kegiatan tahun 2012			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2013)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2013				
					Target Renja SKPD Th. 2012	Realisasi Renja SKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja SKPD Th. 2013	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)			
	kebijakan KDH												
1	20	20	002	1 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Pengembalian kerugian keuangan daerah kpd pemkot	10 kasus	8 kasus	10 kasus	1 kasus	10%	0 kasus	9 kasus	90,00%
1	20	26		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan							0	-	
1	20	26	005	1 Publikasi peraturan perundang-undangan	Tercapainya target PBB	17 kelurahan	17 kelurahan	17 kelurahan	17 kelurahan	100%	17 kelurahan	51 kelurahan	300,00%
1	20	26	009	2 Sosialisasi Peraturan Daerah	Pemahaman masyarakat tentang Perda Pajak Daerah meningkat	2 perda	2 perda	9 perda	9 perda	100%	9 perda	20 perda	1000,00%
1	24			URUSAN WAJIB KEARSIPAN									
1	24	16		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/								

Kode	Usuran/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2011	Target dan realisasi Program dan kegiatan tahun 2012			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2013)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2013				
					Target Renja SKPD Th. 2012	Realisasi Renja SKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja SKPD Th. 2013	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)			
		arsip daerah											
1	24	16	002	1 Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Pengamanan arsip dinas	6 bidang	6 bidang	6 bidang	6 bidang	100%	6 bidang	18 bidang	300,00%
				PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD									
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
1	20	01	001	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Tertib administrasi	5.000 surat	4.500 surat	5.000 surat	4.910 surat	98%	1 tahun	9.411 tahun	188,22%
1	20	01	'002	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya kebutuhan telepon	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300,00%
1	20	01	006	3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya surat-surat kendaraan	55 kendaraan	55 kendaraan	58 kendaraan	58 kendaraan	100%	57 kendaraan	170 kendaraan	309,09%
1	20	01	007	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya personil pengelola keuangan	44 orang	44 orang	34 orang	32 orang	94%	32 orang	108 orang	245,45%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2011	Target dan realisasi Program dan kegiatan tahun 2012			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2013)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2013				
					Target Renja SKPD Th. 2012	Realisasi Renja SKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja SKPD Th. 2013	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)			
		daerah											
1	20	01	008	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya kebersihan lingkungan DPPKD	13 jenis	13 jenis	14 jenis	12 jenis	86%	12 bulan	37 bulan	284,62%
1	20	01	010	6 Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatkan kelancaran tugas dinas	27 jenis	27 jenis	27 jenis	27 jenis	100%	12 bulan	66 bulan	244,44%
1	20	01	011	7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatkan kelancaran tugas dinas	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	12 bulan	36 bulan	300,00%
1	20	01	012	8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat penerangan	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	100%	12 bulan	34 bulan	309,09%
1	20	01	014	9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman bidang perundang undangan	2 jenis	2 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	1 item	5 item	250,00%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2011	Target dan realisasi Program dan kegiatan tahun 2012			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2013)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2013	
					Target Renja SKPD Th. 2012	Realisasi Renja SKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja SKPD Th. 2013	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1 20 01 015	9 Penyediaan peralatan rumah tangga	Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman bidang perundang undangan	0	0 jenis	14 jenis	14 jenis	100%	0 jenis	14 jenis	-
1 20 01 016	10 Penyediaan bahan logistik kantor	Terpenuhinya kebutuhan tabung gas	24 jenis	24 tabung	24 tabung	24 tabung	100%	24 tabung	72 tabung	300,00%
1 20 01 017	11 Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan minum rapat, harian dan tamu	320 set	2.975 set	6 set	6 set	100%	12 bulan	2.993 bulan	935,31%
1 20 01 018	12 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi daerah tercapai	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300,00%
1 20 01 019	13 Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	Guna memperlancar tugas	6 orang	6 orang	7 orang	7 orang	100%	8 orang	21 orang	350,00%
1 20 01 030	14 Pengelolaan administrasi kepegawaian	Kelancaran urusan kepegawaian	78 bendel	78 bendel	78 bendel	78 bendel	100%	82 bendel	238 bendel	305,13%
1 20 02	Program peningkatan									

Kode	Usuran/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2011	Target dan realisasi Program dan kegiatan tahun 2012			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2013)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2013				
					Target Renja SKPD Th. 2012	Realisasi Renja SKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja SKPD Th. 2013	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)			
	sarana dan prasarana aparatur												
1	20	02	005	1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Meningkatkan kinerja aparatur	0 -	1 unit	10 unit	10 unit	100%	0 unit	11 unit	-
1	20	02	006	2 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor untuk peningkatan kinerja	6 unit	6 unit	11 unit	11 unit	100%	5 unit	22 unit	366,67%
1	20	02	007	3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor untuk peningkatan kinerja	0 -	2 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	12 unit	-
1	20	02	010	4 Pengadaan Meubeler	Tersedianya meubeler	0 -	2 unit	8 unit	8 unit	100%	41 unit	51 unit	-
1	20	02	022	5 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatkan kenyamanan tugas	160 unit	6 unit	1 unit	1 unit	100%	1 unit	8 unit	5,00%
1	20	02	024	6 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	58 unit	55 unit	58 unit	58 unit	100%	57 unit	170 unit	293,10%
1	20	02	026	7 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	16 unit	36 unit	360,00%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2011	Target dan realisasi Program dan kegiatan tahun 2012			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2013)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2013	
					Target Renja SKPD Th. 2012	Realisasi Renja SKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja SKPD Th. 2013	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1 20 02 029	8 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya sarana kerja kantor	30 unit	30 unit	7 unit	7 unit	100%	6 unit	43 unit	143,33%
1 20 02 030	9 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	116 unit	116 unit	20 unit	20 unit	100%	16 jenis	152 jenis	131,03%
1 20 02 033	10 Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik/omunikasi	Terpeliharanya peralatan kantor	0 0,00	0 0,00	1 0,00	1 0,00	100%	0 0,00	1 0,00	-
1 20 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
1 20 06 001	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Sebagai pedoman pelaksanaan kinerja	8 jenis	9 jenis	9 jenis	9 jenis	100%	8 jenis	26 jenis	325,00%
1 20 06 002	2 Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersedianya laporan keuangan semesteran yang akurat dan akuntabel	3 jenis	3 bendel	3 bendel	3 bendel	100%	3 bendel	9 bendel	300,00%

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2015	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2011	Target dan realisasi Program dan kegiatan tahun 2012			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2013)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d tahun 2013	
					Target Renja SKPD Th. 2012	Realisasi Renja SKPD Tahun 2012	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja SKPD Th. 2013	Tingkat capaian Realisasi target Renstra (%)
1 20 06 019	3 Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	Tersedianya laporan pengelolaan keuangan SKPD	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	36 bulan	300,00%
1 20 06 020	5 Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	SPJ yang disahkan	0 -	2.180 dokumen	12 bulan	12 bulan	100%	12 dokumen	2.204 dokumen	-

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG**

**LARSITA, SE, M.Sc
NIP. 19661202 199003 1 008**

Pelaksanaan Renja DPPKD Kota Magelang Tahun 2012 sebagian besar terlaksana sesuai output yang diharapkan. Jika dilihat dari realisasi fisik, ada beberapa kegiatan yang perlu ditingkatkan karena pelaksanaannya kurang dari target yang telah ditentukan yaitu :

1. Pengesahan dan penerbitan SPD,
2. Penatausahaan administrasi belanja bantuan keuangan dan tak terduga,
3. Pengelolaan pengarsipan dan pencairan dana,
4. Jasa surat menyurat,
5. Penyedia jasa administrasi keuangan,
6. Penyedia jasa kebersihan.
7. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah

Sedangkan untuk beberapa kegiatan dalam pelaksanaannya melebihi dari apa yang sudah ditargetkan, kegiatan tersebut yaitu :

1. Pengujian SPM langsung penerbitan SP2D SKPD,
2. Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan pencatatan registrasi SPM, SP2D dan Cek,
3. Pengendalian dan penerbitan SPM,
4. Intensifikasi pemungutan PBB,
5. Pengelolaan data dan informasi PBB.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pelaksanaan program kegiatan pada DPPKD Kota Magelang pada tahun 2012 sebagian besar dapat memenuhi target output pada tahun berkenaan. Jika dikaitkan dengan pencapaian indikator pencapaian renstra, kinerja DPPKD secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Magelang

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU / IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Keselarasan dan efektifitas hubungan antara Pemerintahan daerah dan Pemerintah, serta antar Pemerintah daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah		Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Kinerja berdasarkan PP. 8/2006	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
2	Keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan pemerintah		Waktu Penetapan PERDA APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	
			Keberadaan PERDA tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP. 58/2005	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk daerah		Adanya media informasi Pemda yang dapat diakses oleh publik (website,	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU / IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
			kotakpos, bag/ biro humas, leaflet/brosur)											
4	Transparansi dalam pemanfaatan alokasi pencairan dan penyerapan DAU, DAK dan Bagi Hasil		Dana perimbangan yang terserap dibanding yang direncanakan						101,05%	100,40%				
			Belanja publik terhadap DAU						69,74%	190,13%				
			Belanja langsung terhadap total APBD							43,47%	99,02%			
5	Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD dan pinjaman/obligasi daerah		Besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (realisasi)						12,57%	14,24%				

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKU / IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
6	Efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban dan pengawasan APBD		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	
			Rasio SILPA terhadap total pendapatan						7,02%	0,00%				
			Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja						87,22%	83,46%				
7	Pengelolaan Potensi		Rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD						102,34%	99,14%				
			Peningkatan PAD						5,05%	32,78%				

**KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KOTA MAGELANG**

**LARSITA, SE, M.Sc
NIP. 19661202 199003 1 008**

Tingkat capaian kinerja dalam rangka dukungan terhadap pencapaian visi misi Walikota Magelang, program dan kegiatan DPPKD Kota Magelang mendukung pada pencapaian misi pertama, Menciptakan Pemerintahan yang bersih dan profesional dengan peningkatan kapasitas dan responsifitas aparatur yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran dan berkeadilan, dan kedua Meningkatkan sumber – sumber pendanaan dan mendorong tumbuhnya iklim investasi untuk pengembangan usaha yang mampu membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang luas bagi masyarakat.

Dalam pencapaian misi pertama, DPPKD Kota Magelang mendukung dalam pencapaian Pemerintah Kota Magelang untuk mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Daerah pada tahun 2015. Salah satu kegiatan yang mendukung adalah Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , kegiatan ini bertujuan agar semua personil pengelola keuangan daerah memahami tentang bagaimana mengelola keuangan yang akuntabel sehingga nantinya dalam pemeriksaan BPK tidak terdapat temuan.

Untuk mencapai misi yang kedua, DPPKD mempunyai misi yang ketiga yaitu melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah dengan cara melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan sumber – sumber pendanaan daerah. Hal ini dilakukan setelah dilaksanakannya pendaerahan PBB, sehingga pelayanan PBB saat ini dikelola oleh Pemerintah Daerah.

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan SKPD, jika dilihat dari pencapaian indikator kinerja dan SPM sudah mampu dipenuhi dan dilaksanakan. Pencapaian dari segi kuantitas sudah dapat dicapai tetapi masih perlu dikaji lagi tingkat pencapaian dari segi kualitas dokumen yang dihasilkan.

Gambaran isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diantaranya adalah :

- a) Dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD maka terhitung sejak 1 Januari 2011 Pemerintah Kota Magelang akan memungut 2 jenis Pajak baru yaitu BPHTB dan Pajak Air Tanah serta PBB paling lambat tahun 2014
- b) Laporan pengelolaan keuangan dari SKPD mengakibatkan hasil opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Magelang masih WDP

- c) Ditetapkannya Permendagri No. 59 Tahun 2007 memberi implikasi dimana daerah selalu mengalami perubahan peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, sehingga mengalami kesulitan dalam aplikasinya.
- d) Sosialisasi kepada masyarakat tentang Peralihan kewenangan pemungutan dan pengelolaan BPHTB dan Pajak Air Tanah, PBB.
- e) Peningkatan pemahaman SDM berkaitan dengan pengelolaan BPHTB dan Pajak Air Tanah & PBB

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan sistem pemerintahan sentralistik selama Pemerintahan Orde Baru ternyata rapuh dan menciptakan kesenjangan ekonomi serta kemiskinan yang besar. Kondisi tersebut diperparah oleh krisis ekonomi yang menyebabkan kualitas pelayanan publik terganggu dan seluruh sektor perekonomian mengalami kontraksi sehingga mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004, mempunyai konsekuensi yang serius dalam pelayanan publik dan kinerja ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2001 merupakan peluang bagi Pemerintah Daerah di Indonesia untuk melaksanakan serta membiayai sendiri kemajuan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Desentralisasi merupakan peralihan kewenangan dari lingkungan pemerintah pusat (central government) untuk mengatur ke lingkungan pemerintah daerah (local government) untuk mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan kondisi riil yang mengitarinya (Kaloh, 2002). Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Bahl, 2000). Artinya setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) dan memberikan stimulus terhadap aktifitas perekonomian masyarakat. Dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan

dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.

Desentralisasi fiskal juga merupakan salah satu pilar dalam memelihara kesetabilan kondisi ekonomi nasional karena transfer dana ke daerah akan mendorong aktifitas perekonomian masyarakat di daerah. Desentralisasi fiskal tersebut dikelompokkan menjadi dua, sebagai berikut :

1. Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan maksud menciptakan keadilan, pemerataan, dan memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah. Dana perimbangan itu berasal dari penerimaan dalam negeri yang diperoleh dari pendapatan perpajakan, royalti dan bagi hasil sumber daya alam.
2. Dana yang bersumber dari hutang dalam negeri dan luar negeri yang disalurkan ke daerah (subsidiary loan) baik dari hutang bilateral maupun multilateral.

Secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah adalah :

1. Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan pembagian 'kue nasional' baik vertikal maupun horizontal.
2. Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan di bidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang dihasilkan dapat dinikmati oleh rakyat di daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penetapan tujuan dilakukan dengan mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat sesuai dengan tujuan akhir yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi misi DPPKD Kota Magelang adalah:

- a) Tujuan untuk mencapai *misi pertama, Mewujudkan aparatur Pengelola keuangan daerah yang Profesional, akuntabel dan transparan, yaitu :*
 - a.1. Tujuan pertama :Peningkatan kemampuan aparatur dibidang pengelolaan keuangan daerah, dengan sasaran: Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah.
 - a.2. Tujuan kedua: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPPKD untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan sasaran: Tersedianya sarana dan prasarana aparatur DPPKD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

- a.3. Tujuan ketiga: Mewujudkan tertib hukum pada aparatur dan masyarakat tentang pendapatan daerah, dengan sasaran: Pemahaman masyarakat wajib pajak/retribusi dan wajib pajak bumi dan bangunan mengenai produk hukum.
- b) Tujuan untuk mencapai *misi kedua, Mengembangkan sistem dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah*, yaitu :
 - b.1. Tujuan pertama : Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah, dengan sasaran: Terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah
 - b.2. Tujuan kedua: Peningkatan pengelolaan keuangan dan ratio penerimaan daerah terhadap pengeluaran SKPD, dengan sasaran: Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.
 - b.3. Tujuan ketiga: Memfasilitasi kinerja aparatur dalam penerimaan pendapatan, dengan sasaran: Peningkatan perekonomian masyarakat.
- c) Tujuan untuk mencapai *misi ketiga, Melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah*, yaitu Meningkatkan kinerja aparatur dalam penerimaan pendapatan, dengan sasaran terwujudnya koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja aparatur

Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2014 dirangkum dalam tabel berikut:

**Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
DPPKD Kota Magelang
Tahun 2014**

MISI PERTAMA :

No	Sasaran	Program	Kegiatan
1	Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah	Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pembinaan pengelolaan keuangan dan Implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah
2	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur DPPKD dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
			Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
3	Pemahaman wajib pajak/retribusi dan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan mengenai produk hukum	Penataan peraturan perundang-undangan	Publikasi peraturan perundang-undangan
			Sosialisasi Peraturan Daerah

MISI KEDUA :

No	Sasaran	Program	Kegiatan	
1	Terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	
			Penyusunan Laporan pengelolaan keuangan SKPD	
			Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	
			Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan	Penyusunan KUA dan PPAS
				Penelitian DPA dan DPPA
				Pelaporan dan Penatausahaan administrasi gaji PNS/Kontrak
				Pengujian SPM langsung dan Penerbitan SP2D SKPD
				Penyusunan laporan keuangan semesteran
				Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
				Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan
				Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak
				Penyusunan dokumen perjanjian reklame dan penempatan
				Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB
				Penataan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak air tanah
				Pengelolaan pengarsipan dokumen pencairan dana
Penatausahaan administrasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan				
Penatausahaan administrasi belanja bantuan keuangan dan tak terduga				
Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah				

No	Sasaran	Program	Kegiatan
2	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Penyusunan Raperda tentang Pajak dan retribusi daerah
			Penyusunan raperda dan Raperwal APBD
			Penyusunan Rancangan sisdur pemungutan Pajak daerah
			Penataan pengelolaan dokumen pencairan dana
3	Peningkatan Perekonomian masyarakat	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan
			Penyusunan raperda dan Raperwal APBD

MISI KETIGA :

No	Sasaran	Program	Kegiatan
1	Terwujudnya koordinasi dalam rangka peningkatan kinerja aparatur	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB
			Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah
			Intensifikasi pemungutan PBB
			Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program, kegiatan dan pendanaan, disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Sementara itu PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa " Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD menggunakan bahan dari Rencana Kerja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah ".

Oleh sebab itu Rencana Kerja SKPD Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dengan bentuk matrik yang berisikan penjelasan mengenai urusan program dan kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif untuk tahun 2013 s/d tahun 2015 serta sumber dana kegiatan. Matrik DPPKD Kota Magelang dapat dilihat sebagai berikut :

**MATRIKS
RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KOTA MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2014**

SKPD : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN		PAGU INDIKATIF						LOKASI
		TOLOK UKUR	SATUAN	TAR2	Tahun2013	TAR3	Tahun2014	TAR4	Tahun2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
1	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				1.779.694.470,00		4.561.416.000,00		4.925.725.000,00	
	Rasio dana DAK, TP, Dekonsentrasi dan dana hibah serta dana bantuan lainnya terhadap total APBD		0	0,16		0,17		0,18		
	Asset daerah yang dikelola pihak lain.		0	0,21		0,23		0,25		

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN		PAGU INDIKATIF						LOKASI
		TOLOK UKUR	SATUAN	TAR2	Tahun2013	TAR3	Tahun2014	TAR4	Tahun2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Jumlah kerjasama dengan lembaga keuangan	kerjasama	1		2		3		
		Jumlah kerjasama dengan swasta	ada/tidak	ada		ada		ada		
		Jumlah dan jenis bank dan cabang perusahaan asuransi	bank/ BPR	52 bank/BPR		54 bank/BPR		55 bank/BPR		
		Jumlah dan macam pajak	pajak	7		7		7		
	1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	Raperda dan Perda APBD	Buku	350	126.199.710,00	350,00	283.767.000,00	350,00	340.000.000,00	Kota Magelang
	2. Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Dokumen perubahan PPAS	Buku	200	31.500.000,00	150,00	74.841.000,00	150,00	95.000.000,00	Kota Magelang
	3. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Raperwal dan perwal penjabaran Perubahan APBD	Buku	275	142.297.470,00	275,00	246.951.000,00	275,00	220.000.000,00	Kota Magelang
	4. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara	Dokumen PPAS	Buku	150	28.350.000,00	150,00	76.134.000,00	150,00	98.000.000,00	Kota Magelang
	5. Intensifikasi pemungutan PBB dan BPHTB	Jumlah wajib pajak terlayani	Orang	33000	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	310.000.000,00	Kota Magelang

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN		PAGU INDIKATIF						LOKASI
		TOLOK UKUR	SATUAN	TAR2	Tahun2013	TAR3	Tahun2014	TAR4	Tahun2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Raperwal dan perwal penjabaran APBD	Buku	275	142.297.470,00	275,00	223.985.000,00	275,00	220.000.000,00	Kota Magelang
	7. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah buku Raperda dan perda pertanggungjawaban APBD	Buku	468	121.369.500,00	468,00	195.000.000,00	465,00	312.500.000,00	Kota Magelang
	8. Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	Dokumen perubahan KUA	Buku	150	31.500.000,00	150,00	105.847.000,00	150,00	120.000.000,00	Kota Magelang
	9. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	Raperda dan perda perubahan APBD	Buku	350	132.299.370,00	350,00	246.951.000,00	350,00	340.000.000,00	Kota Magelang
	10. Penyusunan Kebijakan Umum APBD	Dokumen KUA	Buku	150	31.500.000,00	150,00	111.037.000,00	150,00	105.000.000,00	Kota Magelang
	11. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	buku raperwal dan perwal pertanggungjawaban APBD	Buku	120	19.255.950,00	120,00	30.565.000,00	120,00	192.500.000,00	Kota Magelang
	12. Penatausahaan Administrasi Belanja Bantuan Keuangan dan Tak Terduga	Jumlah SP2d bantuan dan tak terduga	Buah	3000	40.000.000,00	3.000,00	116.088.000,00	3.000,00	120.000.000,00	Kota Magelang

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN		PAGU INDIKATIF						LOKASI
		TOLOK UKUR	SATUAN	TAR2	Tahun2013	TAR3	Tahun2014	TAR4	Tahun2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	13. Penyusunan anggaran kas	perwal tentang penetapan anggaran	Buku	75	6.076.500,00	75,00	12.153.000,00	75,00	17.000.000,00	Kota Magelang
	14. Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	buku sisdur pengelolaan keuangan	Buku	100	22.500.000,00	80,00	42.250.000,00	85,00	4.225.000,00	Kota Magelang
	15. Penyusunan laporan dan penatausahaan administrasi PBB	Terwujudnya tertib administrasi realisasi dan penatausahaan pendapatan PBB	Laporan	240	25.000.000,00	240,00	105.528.000,00	240,00	150.000.000,00	Kota Magelang
	16. Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Perwal standar operasional prosedur akuntansi daerah	Buku	60	15.000.000,00	60,00	329.816.000,00		0,00	Kota Magelang
	17. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Buku prognosis realisasi APBD	Buku	88	45.000.000,00	88,00	45.000.000,00	88,00	74.000.000,00	Kota Magelang
	18. Pengelolaan dan pengkoordinasian data-data dan sumber daya penerimaan dan pengeluaran pembiayaan	Terkoordinasinya dan tardatanya tertib administrasi laporan	Laporan	12	37.500.000,00	12,00	93.600.000,00	12,00	107.000.000,00	Kota Magelang
	19. Penatausahaan Administrasi Dana Perimbangan dan Lain - lain Pendapatan	laporan bulanan dan triwulanan pencairan dana perimbangan	Laporan	16	37.500.000,00	16,00	93.600.000,00	16,00	145.000.000,00	Kota Magelang

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN		PAGU INDIKATIF						LOKASI
		TOLOK UKUR	SATUAN	TAR2	Tahun2013	TAR3	Tahun2014	TAR4	Tahun2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20. Penelitian DPA SKPD	DPA SKPD yang ditelit	SKPD	48	22.500.000,00	48,00	109.524.000,00	48,00	90.000.000,00	Kota Magelang
	21. Menyusun laporan keuangan konsolidasi bulanan	Buku laporan keuangan konsolidasi	Buku	696	40.000.000,00	696,00	145.996.000,00	696,00	270.000.000,00	Kota Magelang
	22. Pembinaan pengelolaan keuangan dan implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terbinanya Bendahara dan PPK di SKPD	Orang	120	42.991.500,00	120,00	85.983.000,00	120,00	95.000.000,00	Kota Magelang
	23. Pengelolaan pengarsipan dokumen pencairan dana	Dokumen pencairan dana yang ditata	Dokumen	750	30.212.500,00	750,00	24.912.000,00	750,00	67.000.000,00	Kota Magelang
	24. Meneliti dan asistensi laporan keuangan SKPD	laporan keuangan yang diteliti	Laporan	552	15.250.000,00	552,00	33.214.000,00	552,00	64.000.000,00	Kota Magelang
	25. Evaluasi bulanan dan triwulanan PAD dan PBB	laporan realisasi PAD	Eksemplar	510	20.727.000,00	510,00	46.854.000,00	510,00	48.000.000,00	Kota Magelang
	26. Penyusunan laporan realisasi dan penatausahaan administrasi pendapatan daerah	Buku laporan realisasi pendapatan	Buku	60	23.458.000,00	60,00	46.916.000,00	60,00	50.000.000,00	Kota Magelang
	27. Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA SKPD)	DPA SKPD yang diteliti	Buku	48	22.314.500,00	48,00	54.732.000,00	48,00	88.000.000,00	Kota Magelang

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN		PAGU INDIKATIF						LOKASI
		TOLOK UKUR	SATUAN	TAR2	Tahun2013	TAR3	Tahun2014	TAR4	Tahun2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	28. Intensifikasi pemungutan PBB	Percepatan pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan	obyek	34000	160.240.500,00	34.000,00	310.000.000,00	34.000,00	310.000.000,00	Kota Magelang
	29. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Data PAD	Bendel	25	96.390.000,00	1,00	153.000.000,00	1,00	185.000.000,00	Kota Magelang
	30. Penatausahaan administrasi pemungutan BPHTB dan Pajak Air Tanah	Data administrasi pemungutan BPHTB	Bendel	12	17.500.000,00	12,00	33.000.000,00	12,00	33.000.000,00	Kota Magelang
	31. Penyusunan laporan data potensi subyek dan obyek pajak	data potensi subyek dan obyek pajak	Bendel	10	17.306.000,00	12,00	33.000.000,00	12,00	34.000.000,00	Kota Magelang
	32. Intensifikasi dan inventarisasi data tunggakan pajak daerah	data tunggakan pajak	Bendel	9	10.000.000,00	500,00	31.952.000,00	500,00	19.000.000,00	Kota Magelang
	33. Pengesahan dan penerbitan SPD	SPD yang diterbitkan	Dokumen	100	5.745.000,00	100,00	11.490.000,00	100,00	28.000.000,00	Kota Magelang
	34. Pengujian SPM tidak langsung dan penerbitan SP2D SKPD	penerbitan SP2D	Lembar	1800	17.893.000,00	1.750,00	44.865.000,00	1.750,00	37.500.000,00	Kota Magelang
	35. Pengendalian dan penerbitan SPM	SPM yang diterbitkan	Lembar	1500	15.593.500,00	1.500,00	31.214.000,00	1.500,00	37.000.000,00	Kota Magelang
	36. Pengendalian dan pengujian permintaan pembayaran dan	Dokumen pengajuan belanja langsung yang sesuai ketentuan	SKPD	46	61.229.000,00	48,00	122.458.000,00	48,00	140.000.000,00	Kota Magelang

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN		PAGU INDIKATIF						LOKASI
		TOLOK UKUR	SATUAN	TAR2	Tahun2013	TAR3	Tahun2014	TAR4	Tahun2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pencatatan registrasi SPM, SP2D dan cek									
	37. Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	Jumlah SPJ yang diverifikasi	Dokumen	1500	7.698.000,00	1.500,00	87.290.000,00	1.500,00	58.000.000,00	Kota Magelang
	38. Pengelolaan data dan informasi PBB	Jumlah WP-PBB terlayani	Buah	33000	62.500.000,00	33.000,00	125.000.000,00	33.000,00	200.000.000,00	Kota Magelang
	39. Pelaporan dan penatausahaan administrasi gaji PNS/tenaga kontrak	laporan bulanan dan triwulanan	Bendel	88	40.000.000,00	88,00	80.000.000,00	88,00	102.000.000,00	Kota Magelang
	40. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Perwal pedoman kebijakan akuntansi pemerintah daerah	Buku	60	15.000.000,00	60,00			0,00	Kota Magelang
	41. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD (lanjutan)	Raperwal tentang Penjabaran APBD	Raperwal		0,00				0,00	Kota Magelang
	42. Penatausahaan administrasi pajak penerangan jalan umum	Data rekonsiliasi Pajak penerangan jalan umum	Bulan		0,00	12,00	35.334.000,00		0,00	Kota Magelang
	43. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi	raperwal pelaksanaan perda pajak daerah	Raperwal	0	0,00	0,00		0,00	0,00	Kota Magelang

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN		PAGU INDIKATIF						LOKASI
		TOLOK UKUR	SATUAN	TAR2	Tahun2013	TAR3	Tahun2014	TAR4	Tahun2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	44. Penyusunan rancangan peraturan walikota sebagai pelaksanaan perda tentang pajak daerah	Raperwal pelaksanaan Perda Pajak Daerah	Raperwal		0,00				0,00	Kota Magelang
	45. Penyusunan raperda tentang Pajak Bumi dan Bangunan	Pedoman pelaksanaan PBB P-2	Raperda		0,00				0,00	Kota Magelang
	46. Peningkatan potensi PBB	Jumlah Wajib Pajak PBB terlayani	WP		0,00	35.000,00	192.385.000,00		0,00	Kota Magelang
	47. Penyusunan laporan keuangan gabungan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama	Akuntabilitas laporan keuangan	Dokumen		0,00	20,00	40.000.000,00		0,00	Kota Magelang
	48. Bintek pengelolaan PBB	Tersedianya Sumber Daya Manusia siap pakai	kegiatan		0,00				0,00	Kota Magelang
	49. Pengelolaan dan pengkoordinasian permohonan bantuan sosial dan hibah	Bantuan sosial kepada masyarakat	Orang		0,00	1.500,00	154.504.000,00		0,00	Kota Magelang
	50. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD (lanjutan)	Raperda APBD	Raperda		0,00				0,00	Kota Magelang
	51. Penatausahaan dokumen perjanjian	Kesadaran WP dalam membayar pajak	Bulan		0,00	12,00	37.000.000,00		0,00	Kota Magelang

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN		PAGU INDIKATIF						LOKASI
		TOLOK UKUR	SATUAN	TAR2	Tahun2013	TAR3	Tahun2014	TAR4	Tahun2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	reklame dan penempatan									
	52. Penyelesaian Keberatan	Terselesaikannya aduan keberatan dari WP	kegiatan		0,00		37.680.000,00		0,00	DPPKD Kota Magelang
	53. Pengujian dan penerbitan SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran)	Pelayanan PNS purna tugas	Orang		0,00	150,00	20.000.000,00		0,00	Kota Magelang
	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
2	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH				14.000.000,00		11.000.000,00		14.000.000,00	
		Hasil opini BPK untuk Laporan Keuangan	0	WDP		WDP		WTP		
	1. Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	kasus yang ditangani	kasus	10	14.000.000,00	10,00	11.000.000,00	10,00	14.000.000,00	Kota Magelang

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN		PAGU INDIKATIF						LOKASI
		TOLOK UKUR	SATUAN	TAR2	Tahun2013	TAR3	Tahun2014	TAR4	Tahun2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
3	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan				24.147.500,00		125.000.000,00		125.000.000,00	
		Jumlah peraturan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik yang dikeluarkan daerah	perda/ perwal	3		3		3		
		Jumlah dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan Perda	kali	4 kali		4 kali		4 kali		
		Jumlah Perda/ Raperda yang mengakomodasi masukan masyarakat	raperda	12 raperda		12 raperda		12 raperda		
		Ditetapkannya Perda APBD tepat waktu	tepat/ tidak	Tepat waktu		Tepat waktu		Tepat waktu		

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN		PAGU INDIKATIF						LOKASI
		TOLOK UKUR	SATUAN	TAR2	Tahun2013	TAR3	Tahun2014	TAR4	Tahun2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Kesesuaian kelembagaan SKPD dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	sesuai/ tidak	sesuai		sesuai		sesuai		
	1. Sosialisasi Peraturan Daerah	perda yang disosialisasikan	kali	9	14.527.500,00	2,00	25.000.000,00	2,00	25.000.000,00	Kota Magelang
	2. Publikasi peraturan perundang-undangan	Jumlah WP PBB terlayani	kelurahan	17	9.620.000,00	17,00	100.000.000,00	17,00	100.000.000,00	Kota Magelang
	Urusan Wajib Kearsipan									
4	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah				18.159.500,00		33.500.000,00		0,00	
		Terlaksananya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	%	70		80		90,00		
	1. Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah		bidang	6	18.159.500,00	6,00	33.500.000,00	6,00	0,00	DPPKD
	Urusan Pilihan Program Semua SKPD									
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.159.475.000,00		769.167.000,00		790.395.000,00	
	1. Penyediaan jasa kebersihan kantor	peralatan kebersihan	Jenis	12	5.600.000,00	13,00	9.600.000,00	13,00	5.600.000,00	Kota Magelang

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN		PAGU INDIKATIF						LOKASI
		TOLOK UKUR	SATUAN	TAR2	Tahun2013	TAR3	Tahun2014	TAR4	Tahun2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2. Penyediaan jasa surat menyurat	Surat masuk dan keluar	buah	1	11.000.000,00	5.000,00	7.700.000,00	5.000,00	11.000.000,00	Kota Magelang
	3. Penyediaan alat tulis kantor	Alat tulis kantor	Jenis	12	19.000.000,00	27,00	19.000.000,00	27,00	19.000.000,00	Kota Magelang
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah personil pengelolaan keuangan	Orang	42	329.400.000,00	44,00	339.000.000,00	44,00	349.200.000,00	Kota Magelang
	5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan	Jenis	2	2.500.000,00	2,00	2.500.000,00	2,00	2.500.000,00	Kota Magelang
	6. Pengelolaan administrasi kepegawaian	laporan administrasi kepegawaian	Laporan	82	0,00	78,00	35.000.000,00	78,00	35.000.000,00	Kota Magelang
	7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	barang cetakan dan penggandaan	Jenis	12	30.500.000,00	12,00	22.612.000,00	12,00	56.000.000,00	Kota Magelang
	8. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terlaksananya koordinasi daerah	Bulan	12	146.600.000,00	12,00	146.400.000,00	12,00	146.400.000,00	Kota Magelang
	9. Penyediaan bahan logistik kantor	logistik kantor	Buah	24	2.400.000,00	24,00	2.400.000,00	24,00	6.900.000,00	Kota Magelang
	10. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dan kelengkapan	Unit	57	28.540.000,00	55,00	18.100.000,00	55,00	28.540.000,00	Kota Magelang
	11. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	peralatan penerangan gedung kantor	Jenis	12	6.500.000,00	11,00	6.500.000,00	11,00	6.500.000,00	Kota Magelang

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN		PAGU INDIKATIF						LOKASI
		TOLOK UKUR	SATUAN	TAR2	Tahun2013	TAR3	Tahun2014	TAR4	Tahun2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	bangunan kantor									
	12. Penyediaan jasa Tenaga kontrak/honorer daerah/tidak tetap	tersedianya tenaga honorer/kontrak dan petugas lain	Orang	6	70.755.000,00	6,00	86.355.000,00	6,00	64.755.000,00	Kota Magelang
	13. Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	Set	12	45.000.000,00	320,00	47.000.000,00	320,00	46.000.000,00	Kota Magelang
	14. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah rekening telepon	Bulan	12	461.680.000,00	12,00	27.000.000,00	12,00	13.000.000,00	Kota Magelang
	15. Penyediaan peralatan rumah tangga	Alat rumah tangga	Jenis	0	0,00	0,00		0,00	0,00	Kota Magelang
	Urusan Pilihan Program Semua SKPD									
6	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur				656.930.000,00		755.141.000,00		735.250.000,00	
		1. Rasio pemenuhan sarana prasarana perkantoran	0	0,9		0,95		1,00		
	1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas yang terpelihara	Unit	57	350.000.000,00	58,00	293.000.000,00	58,00	306.250.000,00	Kota Magelang
	2. Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan kantor	Unit	34	50.000.000,00	6,00	50.000.000,00	6,00	150.000.000,00	Kota Magelang

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN		PAGU INDIKATIF						LOKASI
		TOLOK UKUR	SATUAN	TAR2	Tahun2013	TAR3	Tahun2014	TAR4	Tahun2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Unit	116	111.430.000,00	116,00	260.000.000,00	116,00	250.000.000,00	Kota Magelang
	4. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	perlengkapan gedung yang terpelihara	Unit	15	10.000.000,00	10,00	10.000.000,00	10,00	6.000.000,00	Kota Magelang
	5. Pengadaan Jaringan/Instalasi Listrik/Air/Komunikasi	Peningkatan kelancaran kerja	Unit	1	10.000.000,00				0,00	Kota Magelang
	6. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	gedung yang terpelihara	Unit	1	19.500.000,00	1,00	19.500.000,00	160,00	17.000.000,00	Kota Magelang
	7. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	jumlah mebeleur yang diperbaiki	Set	30	6.000.000,00	30,00	6.000.000,00	30,00	6.000.000,00	Kota Magelang
	8. Pengadaan mebeleur	jumlah mebeleur	Set	31	50.000.000,00	0,00	75.086.000,00	0,00	0,00	Kota Magelang
	9. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor	Unit	28	50.000.000,00	0,00	41.555.000,00	0,00	0,00	Kota Magelang
	10. Pengadaan kendaraan dinas/operasional	kendaraan roda 2	Buah	12	0,00	0,00		0,00	0,00	Kota Magelang
	Urusan Pilihan Program Semua SKPD									
7	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian				164.349.000,00		223.245.000,00		197.000.000,00	

NO	URUSAN PROGRAM KERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN		PAGU INDIKATIF						LOKASI
		TOLOK UKUR	SATUAN	TAR2	Tahun2013	TAR3	Tahun2014	TAR4	Tahun2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	kinerja dan keuangan									
		Tingkat capaian kinerja pemerintah kota	0	Sgt baik		Sgt baik		Sgt baik		
	1. Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan secara berkala	Bulan	12	42.846.000,00	12,00	42.846.000,00	12,00	56.000.000,00	Kota Magelang
	2. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	RKA/DPA, laporan dinas	Jenis	8	27.500.000,00	8,00	87.000.000,00	8,00	125.000.000,00	Kota Magelang
	3. Penyusunan laporan keuangan semesteran	laporan realisasi keuangan semesteran	Jenis	3	6.109.000,00	3,00	6.109.000,00	3,00	16.000.000,00	Kota Magelang
	4. Penyusunan dan Penelitian Kelengkapan Pencairan Dana	jumlah SPJ yang diverifikasi	Bulan	12	87.894.000,00	0,00	87.290.000,00	0,00	0,00	Kota Magelang
	5. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Buku prognosis realisasi APBD	Bendel	0	0,00	0,00		0,00	0,00	Kota Magelang
	TOTAL				3.816.755.470,00		6.478.469.000,00		6.787.370.000,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Magelang tahun 2014 pada dasarnya merupakan perencanaan kegiatan selama 1 tahun kedepan serta evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, dimana dalam penyusunannya mengacu pada Renstra DPPKD Kota Magelang Tahun 2011 – 2015.

Disamping mengacu pada RPJMD, juga sudah disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan serta Visi, Misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra DPPKD serta bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Magelang yang tertuang dalam RPJMD Kota Magelang. Disamping hal tersebut, Renja juga sebagai dasar dalam penyusunan anggaran pada masing-masing kegiatan dilingkup DPPKD Kota Magelang.

Rencana kerja tahun 2014 terdiri dari 5 (lima) program dan 75 (tujuh puluh lima) kegiatan, dengan pagu indikatif Rp. 6.478.469.000,00 (*enam milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).

Dengan adanya Rencana Kerja DPPKD Kota Magelang Tahun 2014 diharapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2014 dapat Disinergikan dengan program dan kegiatan SKPD yang lain, disamping itu Renja DPPKD Kota Magelang juga merupakan pengendali kegiatan pada masing-masing Sub Bagian / Seksi dan Bidang di lingkup DPPKD Kota Magelang.